



RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	 6
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	23
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	 23
2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 27
2.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	 34
2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	 38
2.10 Penentuan Isu-Isu Strategis	40
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	 43
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	 43
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	47
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 51
 BAB V PENUTUP.....	 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	9
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan	9
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	9
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Staf	10
Tabel 2.5	Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana	10
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026.....	20
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	22
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	26
Tabel 2.9	Keterkaitan Visi.....	37
Tabel 2.10	Keterkaitan Misi.....	37
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	42
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	45
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra PD.....	46
Tabel 3.3	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran : Pendapatan per kapita Masyarakat perikanan.....	49
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra.....	50
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	53
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	65
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	77
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama PD.....	81
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	8
Gambar 2.2	Keterkaitan Visi RPJMN, visi RPJMD DIY dan Pembangunan Tahun Keempat RPJPD DIY, Visi dan arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan Visi Kabupaten Gunungkidul ...	28
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	44
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	44
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	52



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

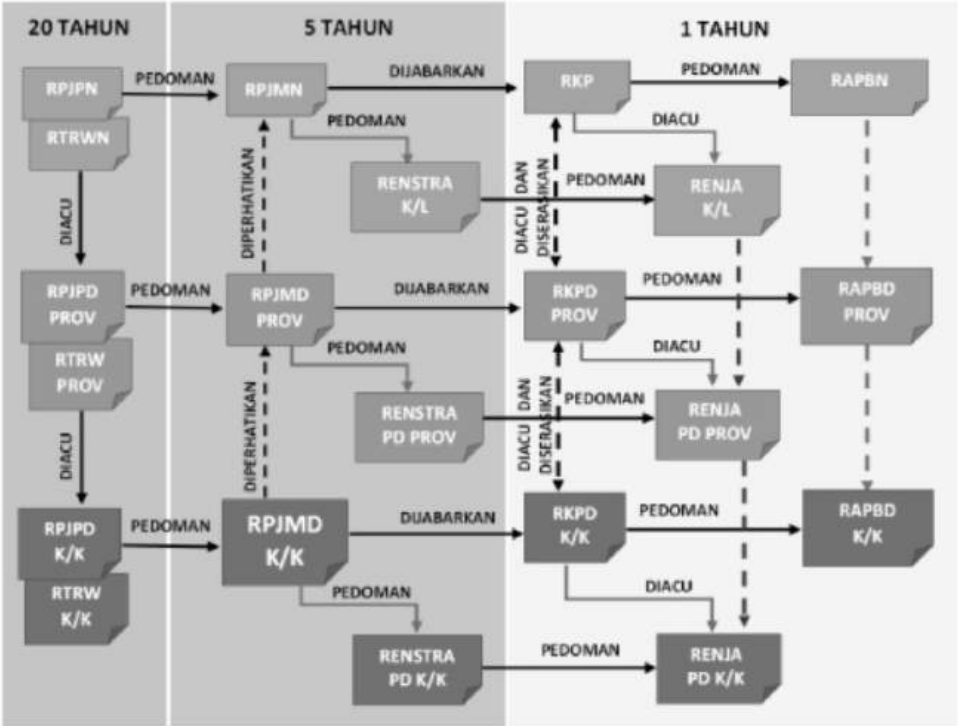
Rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Renstra PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra PD berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan pada analisis lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditentukan serta isu-isu strategis sektor kelautan dan perikanan yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2022-2027. Isu-isu strategis dipetakan dan dianalisis SWOT untuk menentukan alternatif-alternatif strategi ke depan. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaannya tiap tahun sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul merupakan penjabaran lima tahunan dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tanggal 5 Nopember 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gunungkidul untuk menentukan prioritas-prioritas di sektor kelautan dan perikanan dan sebagai acuan semua personel Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mempermudah pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi baik di lingkup internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada semua pihak dan *stakeholders* tentang Rencana Kerja Tahunan dan Lima Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.

4. Menjadi dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan adalah untuk:

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Perangkat Daerah, antar daerah maupun antar fungsi pemerintah;
2. Merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Kelautan dan Perikanan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;
3. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
4. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan Kelautan dan Perikanan;
5. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan; dan;
6. Menyediakan tolok banding (*benchmark*) dalam pengukuran kinerja Kepala Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.10. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V.	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian perbenihan dan produksi perikanan;
- e. Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
- f. Peningkatan produksi, produktivitas kelautan dan perikanan;
- g. Pembinaan, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap serta kelembagaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pencegahan, dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- i. Pelaksanaan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kenelayanan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan usaha perikanan tangkap;
- l. Pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil;
- m. Pelaksanaan harmonisasi dan evaluasi perizinan usaha perikanan tangkap;
- n. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data statistik kelautan dan perikanan;
- o. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- p. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kelautan dan perikanan;

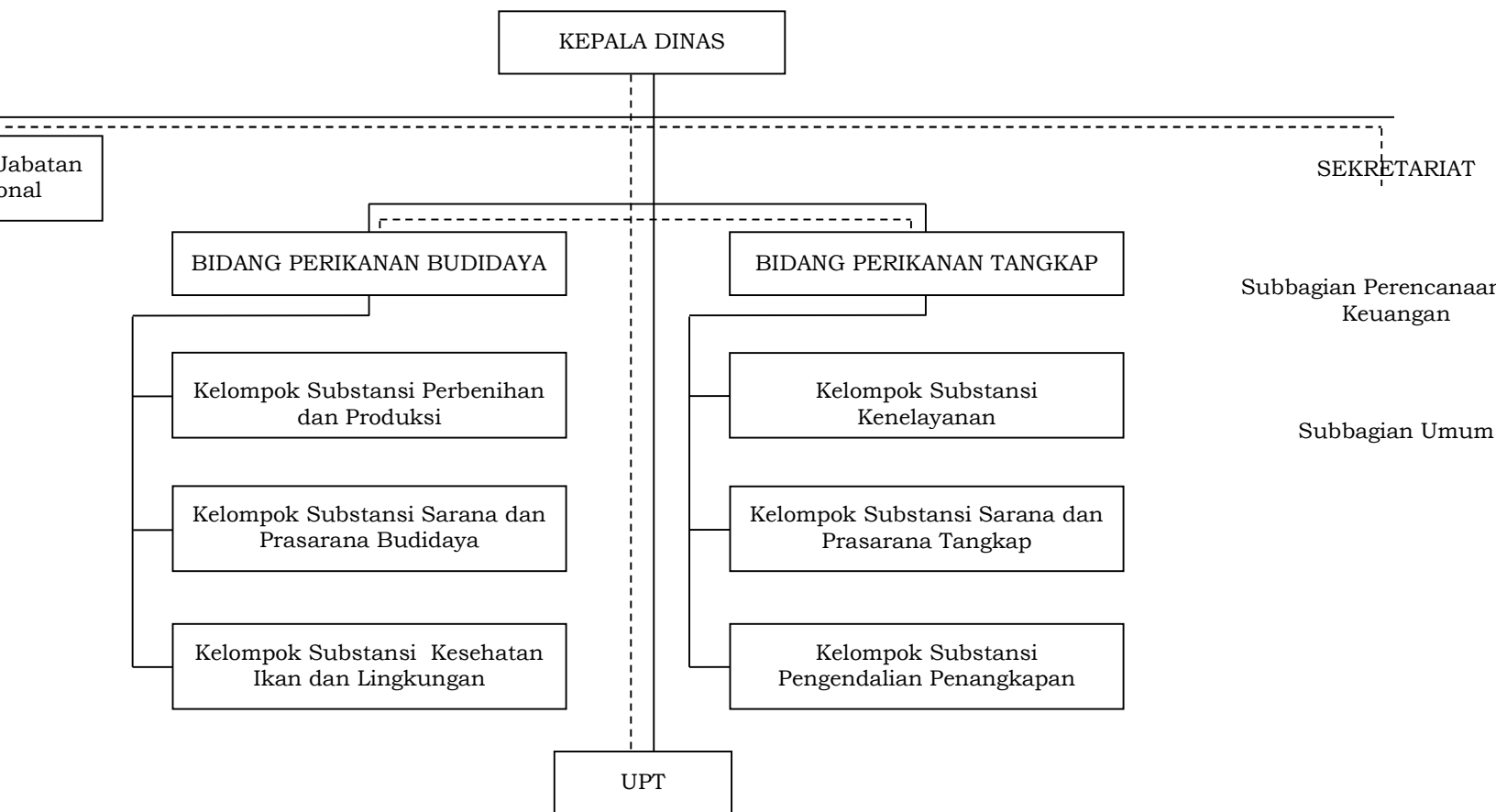
- q. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelautan dan perikanan;
 - r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - s. Pengelolaan UPT.
3. Adapun Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan: Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian.
 - c. Unsur Pelaksana : 1) Bidang–bidang yang terdiri dari Kelompok Substansi
2) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian Umum
- c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - Kelompok Substansi Perbenihan dan Produksi
 - Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - Kelompok Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
 - Kelompok Substansi Kenelayanan
 - Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Tangkap
 - Kelompok Substansi Pengendalian Penangkapan
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari:
 - UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arghamina
 - UPT Balai Benih Ikan (BBI) Mina Kencana
- f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - Analis Akuakultur
 - Teknisi Akuakultur

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul tersaji pada Gambar 2.1. sebagai berikut:

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul



mandor
koordinasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dapat bekerja dengan baik apabila didukung Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana pendukung yang memadai. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai Sumber Daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan per 30 Juni 2025 ada sebanyak 35 orang, terdiri dari 26 laki – laki dan 9 perempuan dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	4 Orang
2.	Sarjana (S1)	14 Orang
3.	Sarjana Muda (D4)	0 Orang
4.	Sarjana Muda (D3)	4 Orang
5.	SMA/SMK	10 Orang
6.	SMP	3 Orang
7.	SD	- -
	Jumlah	35 Orang

Sumber data: Subbag Umum per 30 Juni 2025

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM Tingkat IV	2 orang
2.	SPAMA/DIKLATPIM Tingkat III	3 orang
3.	SPAMEN/DIKLATPIM Tingkat II	0 orang
	Jumlah	5 orang

Sumber data: Subbag Umum per 30 Juni 2025

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	I	0 Orang
2.	II	7 Orang
3.	III	22 Orang
4.	IV	5 Orang
5.	IX	1 Orang
	Jumlah	35 Orang

Sumber data: Subbag Umum per 30 Juni 2025

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan per 30 Juni berjumlah 35 orang terdiri dari 34 orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian per golongan, 7 orang golongan II, 22 orang golongan III, 5 orang golongan IV, dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK golongan IX

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	2 Orang
3.	Eselon IV	6 Orang
4.	Staf	26 Orang
	Jumlah	35 Orang

Sumber data: Subbag Umum per 30 Juni 2025

Per 30 Juni 2025, pegawai yang menduduki Jabatan Struktural di Dinas Kelautan dan Perikanan ada 9 orang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas menduduki jabatan Eselon II, Eselon III tersedia 3 jabatan tetapi terisi 2 jabatan yaitu 2 jabatan Kepala Bidang, dan 6 orang menduduki Eselon IV yaitu: Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala UPT TPI Arghamina, Kepala UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana, Kepala Subbagian TU UPT TPI Arghamina, dan Kepala Subbagian TU UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana.

2. Sumberdaya Sarana Prasarana

Sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
1.	Tanah bangunan kantor pemerintahan	4 Unit	Baik	Kantor DKP
2.	Mesin Pembuat Pellet	4 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
3.	Mesin Pembuat Es	2 Unit	Baik	Pabrik Es Sari Tirta Mina
4.	Portabel Water Pump	2 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
5.	Stationary Water Pump	10 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
6.	Pompa Air	4 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina, Pabrik Es Sari Tirta Mina
7.	Station Wagon	6 Unit	Baik	Kantor DKP
8.	Mini Bus	1 Unit	Baik	Kantor DKP

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
9.	Pick Up	3 Unit	Baik	Kantor DKP
10.	Sepeda Motor	42 Unit	Baik	Kantor DKP
11.	Scooter	4 Unit	Baik	Kantor DKP
12.	Sepeda Motor Roda Tiga	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
13.	Mobil Tangki Air	1 Unit	Baik	Kantor DKP
14.	Mobil Dapur Lapangan	1 Unit	Baik	Kantor DKP
15.	Speed Boat / Motor Tempel	1 Unit	Baik	Kantor DKP
16.	Out Boat Motor	1 Unit	Baik	Kantor DKP
17.	Mesin Bor Tangan	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
18.	Genset	2 Unit	Baik	Kantor DKP, Pabrik Es Sari Tirta Mina
19.	Air Blower	1 Unit	Baik	Pabrik Es Sari Tirta Mina
20.	Aerator/ Blower BBI Susukan Ponjong	1 Paket	Rusak Berat	UPT BBI Mina Kencana
21.	Ice Cam	3 Unit	Baik	Pabrik Es Sari Tirta Mina, UPT TPI Arghamina
22.	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	45 Unit	Baik (20), Rusak Ringan (1) Rusak Berat (24)	UPT TPI Arghamina
23.	Timbangan BBI Kapasitas 100 Kg	21 Unit	Baik (18), Rusak Ringan (2), Rusak Berat (1)	UPT TPI Arghamina
24.	Timbangan BBI Kapasitas 25 Kg	18 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
25.	Neraca Dengan Digital Display	4 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana, Posikandu
26.	Tractor Tangan dengan perlengkapannya	2 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
27.	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Rusak Ringan	UPT BBI Mina Kencana
28.	Mesin Penyiram Rumput	2 Unit	Baik, Rusak Berat	UPT BBI Mina Kencana
29.	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2 Unit	Rusak Ringan, Rusak Berat	UPT TPI Arghamina (TPI Sadeng, TPI Baron)
30.	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1 Unit	Rusak Berat	UPT BBI Mina Kencana
31.	Cold Storage (Kamar Pendingin)	1 Unit	Baik	Pabrik Es Sari Tirta Mina

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
32.	Cold Storage (Cool Box)	3 Unit	Rusak Berat	UPT TPI Arghamina
33.	Alat Pemadam/ Portable	1 Unit	Baik	Pabrik Es Sari Tirta Mina
34.	Bak Pemeliharaan Sementara	4 Unit	Baik, Rusak Ringan	UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
35.	Keramba (Jaring Apung)	5 Unit	Baik	Fish Finder Kantor DKP
36.	Keramba (Jaring Apung)	1 Unit	Rusak Berat	Pompa Celup UPT BBI Mina Kencana
37.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	6 Unit	Baik (4), Rusak Berat (2)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
38.	Lemari Besi/Metal	9 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
39.	Rak Besi	3 Unit	Baik	Kantor DKP
40.	Rak Kayu	9 Unit	Baik	Kantor DKP
41.	Filing Cabinet Besi	31 Unit	Baik, Rusak Ringan	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
42.	Brandkas	2 Unit	Baik	Kantor DKP
43.	Lemari Kaca	13 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT TPI Arghamina
44.	CCTV - Camera Control Television System	3 Unit	Baik	Kantor DKP, Pabrik Es Sari Tirta Mina, UPT BBI Mina Kencana
45.	Access Point	1 Unit	Baik	Kantor DKP
46.	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	Baik	Kantor DKP
47.	White Board	3 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
48.	Mesin Absensi	2 Unit	Rusak Berat	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
49.	LCD Projector/Infocus	6 Unit	Baik (2), Rusak Ringan (1), Rusak Berat (3)	Kantor DKP
50.	Papan Nama Instansi	10 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
51.	Papan Pengumuman	4 Unit	Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat	Kantor DKP
52.	Meja Rapat	29 Unit	Baik (28), Rusak Berat (1)	Kantor DKP
53.	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik	Kantor DKP
54.	Meja Panjang	7 Unit	Baik	Kantor DKP
55.	Meja 1/2 Biro	61 Unit	Baik (48), Rusak Ringan (9),	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
			Rusak Berat (4)	
56.	Kasur/Spring Bed	5 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
57.	Kursi Rapat	127 Unit	Baik (125), Rusak Ringan (2)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
58.	Kursi Tamu	2 Unit	Baik (1), Rusak Berat (1)	UPT BBI Mina Kencana
59.	Kursi Putar	7 Unit	Baik (2), Rusak Berat (5)	Kantor DKP
60.	Kursi Biasa	47 Unit	Baik (28), Rusak Ringan (13), Rusak Berat (6)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
61.	Sofa	7 Unit	Baik (4), Rusak Ringan (3)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
62.	Lemari Kayu	18 Unit	Baik (8), Rusak Ringan (8), Rusak Berat (2)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
63.	Meja Tulis	3 Unit	Baik	Kantor DKP
64.	Meja Biro	7 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
65.	Meja Komputer	2 Unit	Baik	Kantor DKP
66.	Meja Telepon	1 Unit	Baik	Kantor DKP
67.	Meja Tamu Biasa	3 Unit	Baik	Kantor DKP
68.	Kursi Tunggu	2 Unit	Baik	Kantor DKP
69.	Meja Kayu / Rotan	5 Unit	Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
70.	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	20 Unit	Baik (4), Rusak Ringan (14), Rusak Berat (2)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
71.	Meja Makan	12 Unit	Baik (6), Rusak Ringan (5), Rusak Berat (1)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
72.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Unit	Baik	Kantor DKP
73.	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
74.	Lemari Es	3 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
75.	Kipas Angin	5 Unit	Baik (2), Rusak Ringan (1), Rusak	Kantor DKP

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
			Berat (2)	
76.	Ac Unit	13 Unit	Baik (11), Rusak Ringan (1), Rusak Berat (1)	Kantor DKP
77.	Kompor Gas (Alat Dapur)	1 Unit	Rusak Berat (1), Tidak ditemukan (10)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
78.	Oven Listrik	1 Unit	Tidak ditemukan	Kantor DKP
79.	Kitchen Set	3 Unit	Tidak ditemukan	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
80.	Tabung Gas	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
81.	Alat Dapur Lainnya	2 Unit	Rusak Ringan, Rusak Berat	UPT BBI Mina Kencana
82.	Televisi	3 Unit	Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
83.	Sound system	1 Unit	Rusak Berat	Kantor DKP
84.	Wireless	1 Unit	Rusak Ringan	Kantor DKP
85.	Megaphone	5 Unit	Rusak Ringan (4), Rusak Berat (1)	Kantor DKP, UPT TPI Arghamina
86.	Unit Power Supply	4 Unit	Rusak Berat	Kantor DKP
87.	Timbangan Barang	17 Unit	Baik (8), Rusak Ringan (1), Rusak Berat (8)	UPT TPI Arghamina
88.	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Unit	Baik	Kantor DKP
89.	Tiang Bendera	1 Unit	Baik	Kantor DKP
90.	Tangga Aluminium	2 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
91.	Dispenser	3 Unit	Baik (1), Rusak Berat (2)	Kantor DKP
92.	Handy Cam	1 Unit	Rusak Ringan	Kantor DKP
93.	GPS (Global Positioning System)	3 Unit	Baik	Kantor DKP
94.	Water Torn Plastik	3 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
95.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	Baik	Kantor DKP
96.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	Baik	Kantor DKP
97.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2 Unit	Baik	Kantor DKP
98.	Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Baik	Kantor DKP

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
	Eselon II			
99.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17 Unit	Baik	Kantor DKP
100.	Professional Sound System	2 Unit	Baik, Rusak Ringan	Kantor DKP
101.	Chairman/Audio Conference	1 Unit	Baik	Kantor DKP
102.	Camera Digital	2 Unit	Baik, Rusak Ringan	Kantor DKP
103.	Handy Talky (HT)	1 Unit	Rusak Berat	Kantor DKP
104.	Facsimile	2 Unit	Rusak Ringan, Rusak Berat	Kantor DKP
105.	Handphone	1 Unit	Rusak Berat	UPT TPI Arghamina
106.	Tabung O2	3 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
107.	Spectro Photo Meter	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
108.	PH Meter	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
109.	Microscope Dengan Camera	2 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
110.	Haemocytometer	2 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
111.	Photo Meter	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
112.	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	9 Unit	Tidak ditemukan	Gedung P3HP Krakal
113.	Pipet Ukur	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
114.	Kompresor Gauge	20 Unit	Baik (16), Rusak Berat (4)	Kantor DKP (POSIKANDU), UPT BBI Mina Kencana
115.	Gelas Takar	5 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
116.	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
117.	Internet	2 Unit	Baik	Kantor DKP
118.	P.C Unit	18 Unit	Baik (8), Rusak Ringan (3), Rusak Berat (6)	Kantor DKP, UPT TPI Arghamina
119.	Lap Top	17 Unit	Baik (13), Rusak Ringan (3), Rusak Berat (1)	Kantor DKP, UPT TPI Arghamina
120.	Note Book	5 Unit	Baik (2), Rusak Berat (3)	Kantor DKP
121.	CPU (Peralatan Mainframe)	7 Unit	Baik (3), Rusak Berat (4)	Kantor DKP
122.	Hard Disk	2 Unit	Baik	Kantor DKP
123.	Printer	1 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
124.	Monitor	9 Unit	Baik (4), Rusak Berat (5)	Kantor DKP
125.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 Unit	Baik (4), Rusak Ringan (1), Rusak Berat (7)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
126.	Keyboard (Peralatan Mainframe)	18 Unit	Baik (8), Rusak Berat (10)	Kantor DKP
127.	Pesawat Telepon	1 Unit	Rusak Berat	Kantor DKP
128.	Lambang Instansi	1 Unit	Baik	Kantor DKP
129.	Gorden	33 Buah	Baik	Kantor DKP
130.	Tenda Sangga	2 Unit	Rusak Berat	Kantor DKP
131.	Petri Dish	8 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
132.	Autoclave (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
133.	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
134.	Micropipette	3 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
135.	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
136.	Refrigerator Centrifuge	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
137.	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
138.	Refrigerator/Freezer	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
139.	Water Quality Checker	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
140.	Incubator	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
141.	Timbangan Elektronik	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
142.	Hot Plate Stirer	1 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
143.	Erlenmeyer	6 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
144.	Bunsen Gas Bumer	2 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
145.	Tabung Reaksi	52 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
146.	Beaker Glass	4 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
147.	Jarum Suntik No. 12,14,16,19,20	16 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)
148.	Pipet Tetes	200 Unit	Rusak Berat	Kantor DKP (POSIKANDU)
149.	Sepatu (International Safety Tester)	2 Unit	Baik	Kantor DKP (POSIKANDU)

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
150.	Kotak Obat/Kotak Surat/Kotak Saran	3 Unit	Baik	Kantor DKP
151.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Unit	Baik	Kantor DKP
152.	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	10 Unit	Baik	Kantor DKP
153.	Bangunan Penampung Air	6 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
154.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
155.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
156.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	6 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT TPI Arghamina
157.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	9 Unit	Baik (8), Rusak Ringan (1)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
158.	Gedung Pos Jaga Permanen	2 Unit	Baik	Pabrik Es Sari Tirta Mina, UPT TPI Arghamina
159.	Gedung Garasi/Pool Permanen	2 Unit	Baik	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana
160.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	25 Unit	Baik (23), Rusak Ringan (2)	Kantor DKP, UPT BBI Mina Kencana, UPT TPI Arghamina
161.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
162.	Bangunan Kolam/Bak Ikan	3 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
163.	Pagar	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
164.	Jalan Khusus Kompleks	2 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
165.	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
166.	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	3 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
167.	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
168.	Kolam Pasang	3 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
169.	Tanggul Keliling	1 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
170.	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
171.	Sumur Bor	4 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
172.	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	2 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
173.	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	1 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
174.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
175.	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	2 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
176.	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	3 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
177.	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	1 Unit	Baik	UPT BBI Mina Kencana
178.	Jalan Khusus	1 Unit	Baik	UPT TPI Arghamina
179.	Buku-buku Pedoman	1 Buah	Baik	Kantor DKP
180.	Buku Peraturan Perundang-undangan	3 Buah	Baik	Kantor DKP
181.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	9 Buah	Baik	Kantor DKP
182.	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1 Paket	Baik	UPT TPI Arghamina
183.	DED Talud TPI Pantai Baron	1 Paket	Baik	Kantor DKP

Sumber data : Subbag Umum Per Juni 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan serta tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, indikator pelayanan PD dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi dan ditetapkan sebagai indikator untuk mengukur kinerja pemerintah. Indikator sasaran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1. Jumlah produksi perikanan budidaya;
2. Nilai pendapatan pembudidaya ikan meningkat;
3. Nilai pendapatan perikanan tangkap meningkat;
4. Jumlah produksi perikanan tangkap;
5. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya);
6. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP);
7. Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional;
8. Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan;

9. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses iptek, informasi dan penguatan kelembagaan); dan
10. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi.

Capaian kinerja dan realisasi pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul tersaji pada Tabel 2.6. dan 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	IKU																		
1	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan				35.933.219	36.919.810	37.770.213	38.559.577	39.368.834	40.013.365	38.352.397	39.132.901,98			111,35%	103,88%	103,61%		
a	Pendapatan perikanan tangkap (Rp/tahun)				31.776.354,87	32.684.514	33.455.006	34.085.243	34.735.243	34.589.132	32.744.828	34.732.832			108,85%	100,18%	103,82%		
b	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp/tahun)				4.156.864,47	4.235.295,87	4.315.207,11	4.474.334	4.633.591	5.424.234	5.607.569	4.400.070			130,49%	132,40%	101,97%		
2	Nilai AKIP PD				80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	81,60	81,66	82,30			101,87%	101,82%	102,49%		
B	IKK OUTCOME																		
1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) (kg/tahun)		v		10.314,82	14.489,53	14.960,24	15.319,67	15.790,24	16.289	16.841	15.738			158%	116,23%	105,20%		
C	IKK OUTPUT																		
1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		v								4	11							
2.	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional (%)		v							88	88	88							
3.	Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan (surat)		v								50								
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) (Kelompok)		v								58	17							
5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi (1.000 ekor)		v								21.276.385	405.887,5							

Dari Tabel 2.6 diatas tergambar kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Pendapatan per kapita masyarakat perikanan, realisasi IKU sampai dengan Tahun 2024 adalah Rp.39.132.901,98 dari target Rp. 37.770.213,00 atau tingkat capaian 103,60%, dengan rincian pendapatan masyarakat perikanan tangkap sebesar Rp. 34.732.832,00 dan Pendapatan masyarakat perikanan budidaya sebesar Rp. 4.400.070.

Nilai AKIP PD, realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah 82,30 dari target 80,30 atau tingkat capaian 102,49 %

2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya), realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 105,20% dari target 100% dengan rincian realisasi:

1. Produksi perikanan tangkap 4.058 Ton atau 98,32% dari target 4.106 Ton
2. Produksi perikanan budidaya 11.680 Ton atau 107,60% dari target 10.854,24 Ton

Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan tersaji dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	3.117.753.000,000	1.912.705.500,000	1.725.671.337,00	2.184.611.292	-	2.942.254.124	1.860.294.677	1.719.908.000	-		94,37	97,26	99,67	-		7.302.282.660	5.375.851.467,67
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	4.099.278.804,000	3.302.107.819,000	3.115.081.490	3.516.286.382	-	4.034.681.588	3.125.356.987	3.061.588.529	-		98,42	94,65	98,28	-		11.395.539.709	8.180.568.084,67
JUMLAH	7.217.031.804,000	5.214.813.319,000	4.840.752.827,000	5.700.897.674,000	-	6.976.935.712,000	4.985.651.664,000	4.781.496.529,000	-	-	192,795	191,907	197,949	-	-	18.697.822.368,500	13.556.419.552,333

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran layanan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Masyarakat, Kelompok, individu yang menerima manfaat langsung pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam hal pemberian pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan membantu memberikan pelayanan kepada:

1. Nelayan
Yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Mereka adalah individu atau kelompok yang mengandalkan perairan, baik itu sungai, danau, atau laut, sebagai sumber penghidupan utama mereka dengan menangkap ikan dan biota laut lainnya.
2. Pembudidaya Ikan
Yaitu Kelompok atau individu yang memelihara atau mengembangbiakkan ikan dalam lingkungan terkontrol seperti kolam atau tambak untuk menghasilkan ikan dalam jumlah yang lebih besar.
3. Pengolah ikan
Yaitu orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Kegiatan ini mencakup berbagai proses mulai dari penanganan awal seperti pembersihan dan pemotongan, hingga pengolahan lebih lanjut seperti penggaraman, pengeringan, pengasapan, atau pengalengan. Tujuan pengolahan ikan adalah untuk meningkatkan daya awet, nilai ekonomis, dan kualitas produk ikan.
4. Pembudidaya garam
Yaitu orang yang bekerja dalam usaha pembuatan garam, terutama dengan memanfaatkan air laut.
5. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
Yaitu kelompok masyarakat yang dibentuk untuk membantu dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjaga kelestarian lingkungan

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak tantangan yang dihadapi dan juga peluang yang dimiliki. Tantangan pelayanan urusan kelautan dan perikanan yang harus dihadapi antara lain:

- Harga ikan yang tidak stabil menyulitkan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
- Kenaikan suhu laut dan perubahan pola cuaca mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.
- Pencemaran air laut merusak habitat dan mengancam biota laut.

- Nelayan kecil seringkali kesulitan mengakses modal, teknologi, dan pasar.
- Banyak nelayan hidup dalam kemiskinan, terutama di daerah pesisir.
- Kecelakaan kapal perikanan seringkali terjadi, menyebabkan kerugian jiwa dan materi.
- Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan stres pada ikan, penyakit, bahkan kematian.
- Kesulitan dalam mendapatkan pakan berkualitas dengan harga terjangkau menjadi kendala bagi pembudidaya.
- Penyakit ikan, baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit, dapat menyebabkan kerugian besar.
- Pembudidaya seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal untuk pengembangan usaha.
- Perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi perairan dan ketersediaan sumber daya ikan.
- Penangkapan ikan ilegal dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Peluang Pelayanan urusan kelautan dan perikanan antara lain:

- Adanya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, program, dan bantuan modal dapat mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
- Terdapat peluang untuk mengembangkan berbagai jenis produk olahan perikanan, seperti makanan dan camilan berbahan ikan.
- Penerapan teknologi dan praktik budidaya yang baik, produksi perikanan dapat ditingkatkan.
- Pengembangan budidaya perikanan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Sektor perikanan dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, seperti wisata pemancingan atau edukasi budidaya ikan.
- Pengembangan budidaya laut seperti budidaya rumput laut, kerang-kerangan, dan ikan bernilai tinggi (kakap, kerapu) memiliki potensi besar.
- Pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti produk olahan siap saji, dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

Implementasi kebijakan dan strategi pengembangan sektor perikanan tidak dapat lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perangkat daerah. Sarana prasarana utama dan pendukung pelayanan publik yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Kapanewon Wonosari.
2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sejumlah 8 (delapan) unit, meliputi: TPI Higienis Sadeng, TPI Nampu, TPI Siung, TPI Ngandong, TPI Drini, TPI Baron, TPI Ngrehen, dan TPI Gesing).

3. Balai Benih Ikan (BBI) sejumlah 2 (dua) unit yang berlokasi di Susukan dan Beton, Kapanewon Ponjong.
4. Pabrik es sejumlah 1 (satu) unit yang berlokasi di Siraman, Kapanewon Wonosari.
5. Gedung Pos Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU) di Kapanewon Wonosari.
6. Gedung Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan (P3HP) di Pantai Krakal.
7. Depo Pemasaran Ikan di Kapanewon Ponjong.

Potensi lahan untuk perikanan budidaya darat seluas 37,76 ha dan penangkapan ikan perairan umum (telaga, sungai, bendungan, dll) dengan luas 99,82 ha. Pemanfaatan potensi tersebut terkait erat dengan *stakeholder* sektor perikanan. Pelaku utama sektor perikanan merupakan komponen penting dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Gunungkidul. Kelompok pelaku utama perikanan terbagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
2. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
3. Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR);
4. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR); dan
5. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya dan tangkap bertujuan menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Produk hasil perikanan yang berkualitas dipasarkan melalui jaringan pemasaran yang sudah terbentuk ataupun penumbuhan jaringan baru. Perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan kecenderungan jaringan pemasaran konvensional bergeser menjadi jaringan pemasaran secara digital.

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Efektivitas serta efisiensi pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan diperlukan pemahaman terhadap dinamika kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Kondisi atau aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan merupakan bahan perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perumusan isu-isu strategis ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian, serta memanfaatkan peluang secara optimal.

2.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan perikanan tangkap belum optimal	Produksi perikanan tangkap masih belum kontinu	- Sarana dan prasarana produksi nelayan belum memadai - Kapasitas SDM dan kelembagaan KUB belum optimal - Permodalan nelayan terbatas - Regenerasi nelayan lambat - Kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi nelayan masih rendah - Belum adanya penjaminan asuransi terhadap aset produksi nelayan
2	Budaya makan ikan masih rendah	Kesadaran masyarakat tentang manfaat makan ikan masih rendah	- Masih adanya pandangan negatif tentang manfaat makan ikan - Ketersediaan ikan di Gunungkidul rendah - Kelembagaan dinas yang menangani pengolahan dan pemasaran tidak ada - Kualitas mutu hasil perikanan masih rendah
3	Produksi perikanan budidaya belum optimal	Usaha budidaya perikanan masih bersifat subsisten	- Sarana dan prasarana produksi kelompok belum memadai - Kapasitas SDM dan kelembagaan Pokdakan belum kuat - Harga pakan pabrikan tinggi - Ketersediaan air di

			beberapa wilayah terbatas
4	Pendapatan Asli Daerah sektor kelautan dan perikanan belum optimal	Produksi es balok pada Pabrik Es Sari Tirta Mina belum memadai	Mesin pabrik es sudah melampaui usia ekonomis
		Pelayanan TPI belum optimal	- Keterbatasan sarana prasarana - Keterbatasan SDM - Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi - Penanganan pasca panen perikanan tangkap yang belum optimal - Bangunan TPI Nampu belum tersedia
		Pelayanan BBI belum optimal	- Keterbatasan sarana prasarana - Keterbatasan SDM - Ketersediaan air pasok di BBI Susukan terbatas - Induk terbatas dan kurang berkualitas - Benih belum bersertifikat

2.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis daerah sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”

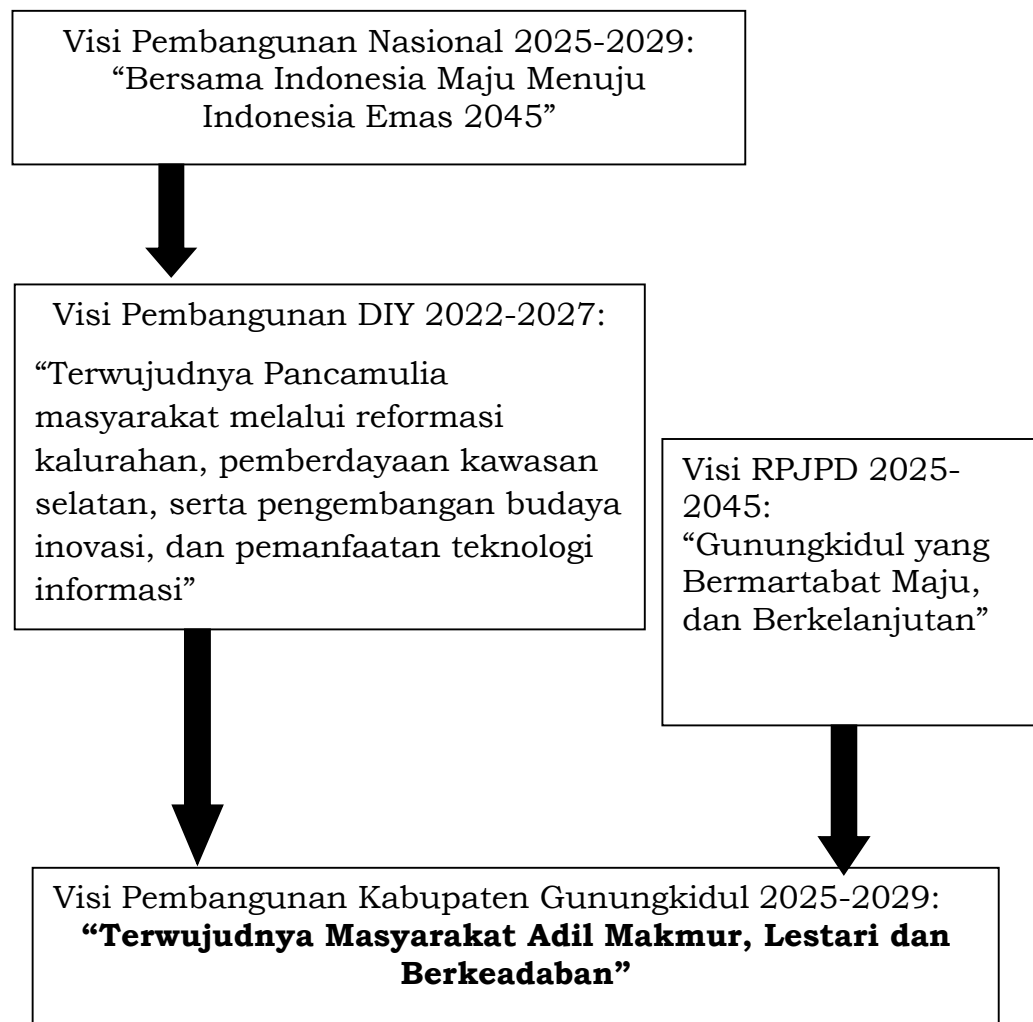
Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat adil makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun

spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. Masyarakat berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Visi Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang disebut sebagai 8 Misi Astacita. Visi juga berpedoman pada pembangunan diatasnya yaitu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dalam dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 yaitu: terwujudnya Pancamulia masyarakat melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.



Gambar 2.2.

Keterkaitan Visi RPJMN, visi RPJMD DIY dan Pembangunan Tahun Keempat RPJPD DIY, Visi dan arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan Visi Kabupaten Gunungkidul

Dari Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" dijabarkan dalam program Prioritas sebagai berikut:

1. Program Bocah Pintar.
Meningkatkan derajat Pendidikan warga melalui penyelenggaraan Pendidikan dasar yang berkualitas dan merata.
2. Program Warga Sehat.
Meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan untuk rakyat.
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya.
Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor unggulan Gunungkidul khususnya sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan skala usaha mikro dan kecil, dan industri pariwisata berbasis masyarakat.
4. Gunungkidul Berdikari.
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal dan investasi ramah lingkungan yang

- didukung infrastruktur berkualitas.
5. Pamong Nglayani dan Ngayomi.
Meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan, kualitas layanan publik dan penghormatan hak politik warga serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.
 6. Program Warga Gayeng dan Guyup.
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan melestarikan budaya luhur.
 7. Program Alam Lestari .
Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan resiliensi warga terhadap bencana dan perubahan iklim.

Secara umum, misi merupakan garis besar upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana. Kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.

Misi pertama diarahkan pada peningkatan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan derajat pendidikan warga dengan memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata. Penguatan pendidikan budi pekerti dalam kurikulum sekolah menjadi salah satu Langkah utama, diiringi dengan integrasi metode pembelajaran yang membangun daya pikir kritis-dialektis serta mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah ini bertujuan membentuk generasi yang berkarakter, inovatif, dan berkompeten. Untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, diperlukan pengelolaan basis data tingkat Pendidikan warga sebagai dasar peningkatan layanan pendidikan gratis bagi anak usia dini hingga jenjang menengah. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang standar, aman bencana, serta ramah anak menjadi prioritas guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kolaborasi dengan berbagai pihak terus diperluas guna meningkatkan akses Pendidikan tinggi, khususnya bagi warga miskin. Dukungan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan bagi Masyarakat berpendapatan rendah juga diperkuat untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan. Selain itu, peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan menjadi aspek penting dalam menciptakan system Pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya selanjutnya diarahkan untuk

memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Penanganan pencegahan tengkes (stunting) menjadi salah satu prioritas utama dengan pemberian makanan bergizi berbasis pangan local bagi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta edukasi mengenai tumbuh kembang dan pengasuhan anak yang menyasar calon pengantin serta remaja perempuan. Selain itu, peningkatan kualitas serta penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan, baik di tingkat primer maupun rujukan, terus diperkuat untuk memastikan layanan medis yang lebih optimal, termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit juga dilakukan dengan memberdayakan Masyarakat serta mengedepankan pendekatan berbasis budaya agar lebih efektif. Di sisi lain, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga medis serta tenaga kesehatan menjadi perhatian utama guna memastikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Untuk mendukung kesehatan keluarga secara menyeluruh, pembangunan keluarga, kependudukan, dan program keluarga berencana dilaksanakan secara terintegrasi demi menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Misi 2: Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.

Misi kedua bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, terutama dalam sektor produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung ekonomi skala kecil dan menengah yang inklusif serta kreatif. Upaya ini diwujudkan dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan Gunungkidul, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan skala usaha mikro dan kecil, serta pariwisata berbasis masyarakat. Langkah-langkah strategis yang ditempuh meliputi peningkatan penyediaan dan akses terhadap pupuk, obat, instrumen pengendalian hama, benih berkualitas, serta pakan ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Selain itu, infrastruktur yang mendukung produktivitas sektor pertanian, perdagangan rakyat, industri pengolahan, dan pariwisata berbasis masyarakat terus diperbaiki dan diperluas. Pemerintah daerah dan BUMD juga diwajibkan mengutamakan belanja publik untuk menyerap produk lokal, khususnya dari koperasi dan UMKM setempat. Peningkatan kapasitas bagi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan menjadi perhatian utama, termasuk melalui perluasan pembangunan pertanian terpadu berbasis Lumbung Mataraman. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, fasilitasi peningkatan kapasitas dan akses pasar bagi industri pengolahan, perdagangan tradisional, dan pariwisata terus diperkuat. Pengembangan daya tarik wisata dilakukan secara

kolaboratif dan partisipatif agar lebih berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi, perluasan akses kredit usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi rakyat secara menyeluruh.

Misi 3: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Misi ketiga diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal serta mendorong investasi yang ramah lingkungan, didukung oleh infrastruktur berkualitas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, termasuk jalan, penerangan, air bersih, telekomunikasi, dan listrik, guna meningkatkan kualitas kehidupan warga sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Potensi sumber daya lokal terus dipromosikan kepada investor, baik lokal maupun nasional, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor unggulan. Selain itu, tata kelola perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terus dibenahi agar lebih mudah, transparan, terjangkau, dan tepat waktu sehingga mampu meningkatkan daya tarik investasi. Selanjutnya, untuk mendukung investasi yang berkelanjutan, insentif dan kemudahan diberikan kepada investor yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Sementara itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah dilakukan melalui penguatan tata kelola perpajakan dan retribusi daerah, pengembangan BUMD, serta optimalisasi aset daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi dan pembangunan daerah secara mandiri.

Misi 4: Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Misi keempat menegaskan komitmen terhadap Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hukum untuk menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan integrasi perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kepastian hukum bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah dijalankan berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, didukung oleh pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. Program pembangunan daerah dilaksanakan secara adil dengan menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang agama, etnis, suku, maupun kondisi difabel, dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Transformasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi terus

dipercepat guna mewujudkan pemerintahan cerdas (smart government), sejalan dengan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif serta pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi. Bidang demokrasi dan ketertiban sosial, pemerintah daerah berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, memperkuat nasionalisme, serta menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan tertib. Reformasi birokrasi diperluas hingga tingkat pemerintahan kalurahan melalui kolaborasi lintas sektor. Hak-hak politik rakyat dijamin agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan penyusunan regulasi (participatory legal drafting), sekaligus mempersempit ruang pengaruh kelompok superkaya (oligarki) yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, penegakan hukum yang adil, tegas, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat terus dipercepat, didukung oleh kerja sama lintas pemerintahan, wilayah, dan aktor masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, akses terhadap perlindungan sosial diperluas dengan pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Misi 5: Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Misi kelima berfokus pada pemajuan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, penghormatan terhadap hak-hak kelompok rentan, serta pelestarian budaya luhur. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, optimalisasi jaminan sosial bagi kelompok rentan, serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kapasitas layanan rehabilitasi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi perempuan terus diperkuat melalui pelatihan bisnis, akses permodalan, serta kampanye kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual terus ditingkatkan. Selanjutnya, pelestarian budaya dilakukan melalui penguatan nilai-nilai luhur budaya lokal berbasis Pancasila, peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan, serta digitalisasi seni dan budaya Gunungkidul. Festival budaya juga dikembangkan untuk memperkuat promosi dan pemanfaatan budaya lokal. Dalam aspek lingkungan, kebijakan diarahkan pada pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pengembangan wilayah, pelestarian kawasan lindung, serta pengelolaan sampah secara terpadu. Pengembangan kawasan berbasis potensi ekologis terus didorong untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, upaya peningkatan

resiliensi warga terhadap bencana dan perubahan iklim diperkuat melalui perluasan Kalurahan Tangguh Bencana serta peningkatan sosialisasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

2.8.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

b. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, KKP terutama melaksanakan tujuh dari delapan misi (8 Misi Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).”;
2. “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.”;
3. “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.”;
4. “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.”;
5. “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.”;
6. “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.”;
7. “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.”; dan
8. “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.”

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung misi Asta Cita ke-2 sampai dengan misi ke-8.

c. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. “Peningkatan fungsi sumber daya kelautan untuk pelestarian keanekaragaman hayati serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana.”
2. “Peningkatan kontribusi ekonomi biru terhadap perekonomian nasional dan peningkatan produksi pangan akuatik untuk mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.”
3. “Percepatan hilirisasi dan industrialisasi kelautan dan perikanan.”
4. “Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.”
5. “Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan public.”

d. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029 terdiri dari:

- SS-1 Meningkatnya luas dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- SS-2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor kelautan perikanan secara berkelanjutan;
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten;
- SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

2.8.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2022-2027 adalah “Mewujudkan PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Pancamulia sebagai visi RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Penjabaran Pancamulia adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 adalah:

- 1) Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup- kehidupan-penghidupan warga pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan;
- 2) Memberdayakan Kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
- 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptinalkan kemanfaatan kemajuan teknologi indormasi;
- 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Untuk lebih jelasnya kaitan antara telaahan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (DKP DIY) dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul (DKP GK).

Tabel 2.9.
Keterkaitan Visi

KKP	DKP DIY	DKP GK
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban

Tabel 2.10.
Keterkaitan Misi

KKP	DKP DIY	DKP GK
1. Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional dan swasembada pangan 3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di KKP	1. Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan 2. Memberdayakan Kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur,peningkata n kapasitas SDM, dan perlindungan/ pengelolaan sumber daya setempat 3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptinalkan kemanfaatan kemajuan teknologi indormasi 4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.

2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.9.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY tahun 2023-2043 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Kawasan peruntukan perikanan terbagi dalam beberapa kapanewon, yaitu :

- 1) Kawasan budi daya air tawar meliputi seluruh Kapanewon;
- 2) Kawasan budi daya perikanan laut di Kapanewon Tepus; dan
- 3) Kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir meliputi Kapanewon Panggang, Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus dan Kapanewon GiriSubo.

Dalam perkembangan sistem perkalurahanan pada RTRW Kabupaten Gunungkidul terdapat sistem perkalurahanan, salah satunya adalah Sistem Kalurahan dalam Kawasan Minapolitan. Sistem kalurahan dalam kawasan minapolitan merupakan kawasan yang diciptakan dengan basis ekonomi sub sektor perikanan. Kawasan minapolitan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebagian besar masyarakat memperoleh pendapatan dari sektor perikanan.
- b. Sebagian besar kegiatan didominasi oleh sektor perikanan (pengolahan, perdagangan), minabisnis hulu (sarana prasarana, permodalan, minawisata, dan jasa *service*).
- c. Hubungan interdependensi dengan wilayah *hinterland*.

Rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. Kawasan Minapolitan Playen di Kapanewon Playen meliputi Kalurahan Plembutan, Kalurahan Bleberan, Kalurahan Banyusoca, Kalurahan Gading, dan Kalurahan Ngawu;
- b. Kawasan Minapolitan Ponjong di Kapanewon Ponjong meliputi Kalurahan Ponjong, Kalurahan Genjahan, Kalurahan Umbulrejo bagian selatan, Kalurahan Sidorejo; dan
- c. Kawasan Minapolitan Sadeng di Kapanewon GiriSubo meliputi Kalurahan Songbanyu dan Kalurahan Pucung.

Secara umum, pengembangan kawasan minapolitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Minapolitan Playen

Pengembangan Minapolitan Playen direncanakan berbasis pada budidaya ikan non sisik, khususnya komoditas ikan lele di lahan kering dengan sistem terpal.

Ini merupakan bentuk pengembangan perikanan di lahan kering yang mempunyai karakteristik lahan marginal dan ketersediaan air terbatas. Karakteristik sistem ini adalah:

- Di usahakan didaerah kering/curah hujan kecil.
- Memanfaatkan air tadah hujan.
- Menggunakan karpet/terpal.

2) *Minapolitan Ponjong*

Rencana pengembangan Minapolitan Ponjong diarahkan pada budidaya ikan air tawar baik pembenihan, pembesaran, dan diversifikasi produk olahan. Jenis ikan yang dibudidayakan terutama ikan bersisik khususnya komoditas ikan nila dan gurami. Kawasan ini juga diberfungsi sebagai kawasan wisata kuliner ikan air tawar.

Kawasan Minapolitan Ponjong di Kapanewon Ponjong meliputi Kalurahan Ponjong, Kalurahan Genjahan, Kalurahan Umbulrejo bagian selatan, Kalurahan Sidorejo.

3) *Minapolitan Sadeng*

Minapolitan Sadeng direncanakan sebagai kawasan minapolitan dengan basis pengembangan ekonomi perikanan tangkap. Kawasan Minapolitan Sadeng di Kapanewon Girisubo meliputi Kalurahan Songbanyu dan Kalurahan Pucung. Wujud dari rencana pengembangan Minapolitan Sadeng diperlukan strategi pengembangan sebagai berikut:

- a. Peningkatan produksi perikanan tangkap.
- b. Peningkatan kualitas hasil tangkapan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
- d. Peningkatan pemanfaatan produksi melalui diversifikasi olahan.

2.9.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Penetapan isu paling strategis KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, didasarkan pada hasil Konsultasi Publik KLHS RPJMD serta keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Gunungkidul, dan isu strategis dokumen perencanaan lainnya. Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 didapat 17 isu strategis pembangunan, yang dibagi menjadi empat pilar, yaitu:

Pilar Sosial

1. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.
2. Rendahnya kualitas ketahanan pangan dan gizi.

3. Masih adanya stunting dan pelayanan kesehatan belum optimal.
4. Terbatasnya pelayanan pendidikan.
5. Rendahnya pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti program keluarga berencana.

Pilar Ekonomi

7. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan.
8. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.
9. Terbatasnya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Pilar Lingkungan

10. Akses penyediaan air minum dan pengelolaan sumber daya air belum merata.
11. Belum terkelolanya bauran energi terbarukan.
12. Masih rendahnya tingkat layanan pengelolaan sanitasi, persampahan, dan limbah B3.
13. Ancaman peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim.
14. Degradasi lahan dan rendahnya pelestarian keanekaragaman hayati.

Pilar Hukum dan Tata Kelola

15. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.
16. Akselerasi transformasi digital pelayanan publik masih rendah.
17. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran secara tidak langsung dalam pencapaian target TPB, utamanya yaitu isu ketahanan pangan dan gizi. Indikator TPB urusan ketahanan pangan dan gizi yang dimaksud adalah kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Tingkat konsumsi ikan dipengaruhi oleh ketersediaan ikan. Ketersediaan ikan dalam satu tahun terkait erat dengan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, ikan masuk dan ikan keluar.

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah permasalahan aktual dan krusial yang dihadapi, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan perangkat daerah melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan pencapaian visi-misi RPJMD. Perumusan isu-isu strategis pada dasarnya bertujuan mengungkapkan keadaan

lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.

Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah dimasa mendatang, di mana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, keterkaitan visi dan misi renstra KKP dan Dislautkan DIY serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka ditentukan isu-isu strategis sub sektor kelautan perikanan Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan;
3. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Teknik penentuan Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat daerah dijelaskan pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelautan dan Perikanan	1. Produksi perikanan masih belum kontinu	Rendahnya kualitas ketahanan pangan dan gizi	Perubahan Iklim sangat mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan	Kelautan dan perikanan merupakan bagian dari ekonomi biru yang merupakan konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.	Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya belum mencukupi kebutuhan ikan di DIY	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan
	2. Kesadaran masyarakat tentang manfaat makan ikan masih rendah	Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan
	3. Usaha budidaya perikanan masih bersifat subsisten					Peningkatan konsumsi ikan masyarakat
	4. Produksi es balok pada Pabrik Es Sari Tirta Mina belum memadai					
	5. Pelayanan TPI belum optimal					
	6. Pelayanan BBI belum optimal					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah (PD). Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

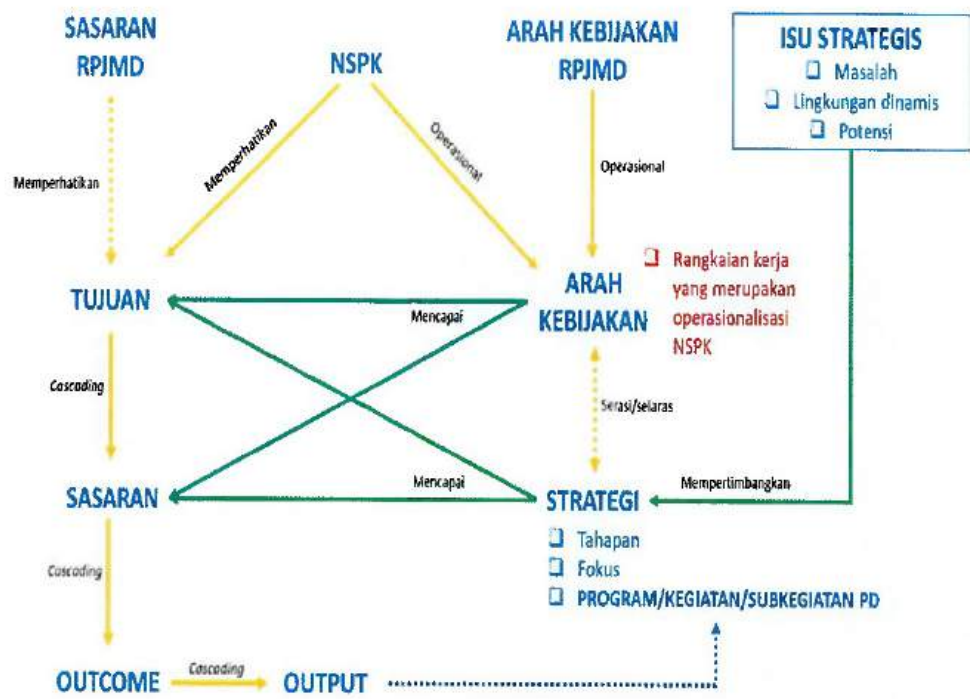
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul periode 2025-2029, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan Misi 2: **Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

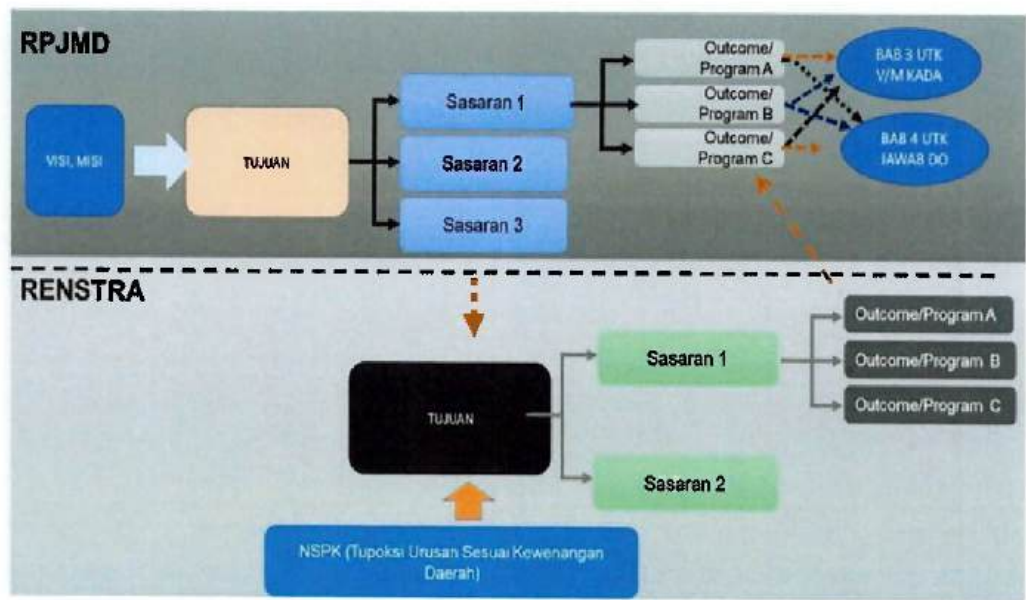
1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan PD;
2. Sasaran jangka menengah daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PD;
3. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD (Indikator Kinerja Utama);
4. Kelompok sasaran yang dilayani;
5. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
6. Isu-isu strategis PD yang sesuai dengan bidang layanan PD;
7. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
8. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran.

Konsep Renstra PD, Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD disajikan dalam Gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah		Nilai Produksi Perikanan (Rupiah)	401.283.752.468	404.135.066.032	407.002.185.408	409.885.551.585	412.785.625.861	415.702.890.836	Akumulasi nilai produksi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan
		Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan (Rupiah)	46.260.082	47.491.086	48.733.640	49.988.322	51.255.737	52.536.524	Jumlah pendapatan masyarakat perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan

Penetapan sasaran kinerja perangkat daerah memberikan gambaran tentang kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul pada periode 2025-2029. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan menjabarkan kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan secara terinci guna mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta sasaran dan indikator kinerja pendukung pencapaian IKU daerah. Program/ kegiatan/sub kegiatan teknis akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKU perangkat daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan penunjang akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja PD yang akan berdampak pada pencapaian IKU daerah.

Pencapaian visi pembangunan dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema penguatan fondasi pada periode lima tahun pertama. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan pembangunan disajikan pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah	Percepatan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah	Peningkatan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah	Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah	Pemantapan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah

3.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

3.2.1. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Perumusan strategi pada Renstra PD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.

A. Identifikasi Faktor Internal

Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, serta berada dalam kondisi baik, dikategorikan sebagai kekuatan (*strengths*). Sebaliknya kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan tugas, dan sumber daya yang terbatas dan kapasitasnya berkurang, dikategorikan sebagai kelemahan (*weaknesses*).

1) Kekuatan (*Strengths*) :

Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mandiri dan Komitmen Kepala Daerah dalam Pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006 dan mulai operasional tanggal 19 Januari 2007 yang diikuti dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 146 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

- a. Kebijakan kawasan peruntukan perikanan.
- b. Pengelolaan 8 (delapan) unit TPI, 2 (dua) unit BBI, 1 (satu) unit pabrik es dan 1 (satu) unit POSIKANDU.

2) Kelemahan (*Weaknesses*) :

- a. Jumlah personil belum proporsional.
- b. Keterbatasan personil yang memiliki kompetensi bidang kelautan dan perikanan.

B. Identifikasi Faktor Eksternal

Kinerja instansi pemerintah tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, oleh karenanya analisa faktor lingkungan sangat diperlukan untuk mengendalikan berbagai hambatan dalam mewujudkan visi dan misi. Harapan dan keinginan masyarakat yang mendatangkan keuntungan atau manfaat dikemudian hari dapat dikategorikan sebagai peluang (*opportunities*), sebaliknya suatu faktor lingkungan yang tidak mendatangkan manfaat atau bahkan sebagai penghalang di kemudian hari dapat dikategorikan sebagai tantangan (*challenge*).

1) Peluang (*Opportunities*)

- a. Potensi lahan perikanan budidaya dan tangkap belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal.
- b. Bertambahnya kelompok pelaku utama perikanan.

2) Tantangan (*Challenge*)

- a. Pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya dan tangkap secara berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- b. Produk hasil kelautan dan perikanan berkualitas dan berdaya saing.

Upaya mencari dan menentukan nilai-nilai strategis pada suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini merupakan interaksi antara faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal untuk menghasilkan isu-isu strategis yang diperlukan dalam menentukan target sasaran strategis yang perlu dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. Hasil interaksi tersebut memunculkan strategi atau upaya/cara untuk mengatasi permasalahan dan ancaman dengan memanfaatkan potensi dan peluang. Dari keempat unsur yang dihadapi dan dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul secara internal memiliki sejumlah kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) dan secara eksternal memiliki berbagai peluang (*Opportunities*) dan menghadapi berbagai tantangan (*Challenge*).

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya diidentifikasi analisis faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, seperti tertera pada Tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3.
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran : Pendapatan per kapita
masyarakat perikanan

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : a. Potensi lahan perikanan budidaya dan tangkap belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. b. Bertambahnya kelompok pelaku utama perikanan.	Tantangan : a. Pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya dan tangkap secara berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. b. Produk hasil kelautan dan perikanan berkualitas dan berdaya saing.
Kekuatan : a. Kebijakan kawasan peruntukan perikanan. b. Pengelolaan 8 (delapan) unit TPI, 2 (dua) unit BBI, 1 (satu) unit pabrik es dan 1 (satu) unit POSIKANDU.	Alternatif strategi : a. Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat perikanan. b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Alternatif strategi : a. Penerapan teknologi budidaya, penangkapan ikan serta pengolahan hasil perikanan yang tepat guna dan tepat sasaran. b. Memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan
Kelemahan : a. Jumlah personil belum proporsional. b. Keterbatasan personil yang memiliki kompetensi bidang kelautan dan perikanan.	Alternatif strategi : a. Pembinaan dan pendampingan kelompok pelaku utama perikanan. b. Optimalisasi peran dan kaderisasi penyuluh swadaya.	Alternatif strategi : a. Mendorong inovasi dan diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan. b. Meningkatkan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kelompok pelaku utama perikanan.

3.2.2. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah.

Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra tersaji pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan penyediaan sarana produksi perikanan secara optimal	Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang optimal dan meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna	
		Meningkatkan upaya pelestarian potensi sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang terkendali	Meningkatkan upaya pelestarian sumberdaya perikanan	
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM Pelaku usaha kelautan dan perikanan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran tiap PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

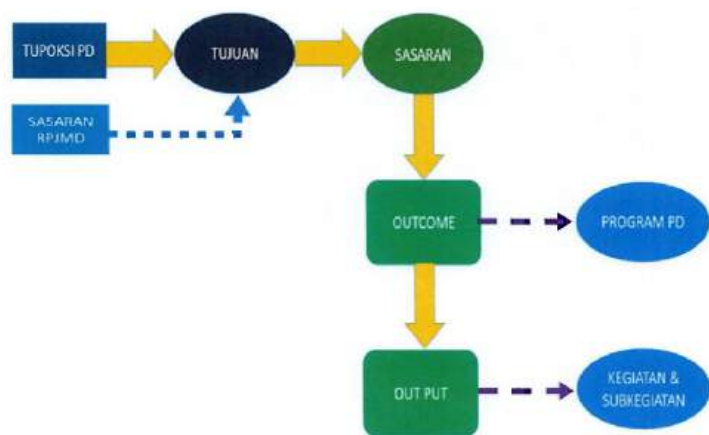
Untuk mencapai visi misi Bupati terpilih dirumuskan dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah yang diterjemahkan melalui program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program-program prioritas untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati terpilih Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan merupakan dana pembantuan dari Pemerintah Propinsi DIY terhadap daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sehingga dalam pelaksanaannya tergantung dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat.

Penjabaran rencana program dan kegiatan tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tersaji dalam gambar 4.1 dibawah ini:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD

Teknik Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam Tabel 4.1. dengan format sebagai berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra PD
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah				Nilai Produksi Perikanan (Rp)		
		Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat		Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan (Rp)		
			Terwujudnya kawasan ruang strategis kabupaten Gunungkidul yang optimal di UPT TPI Arghamina		Persentase pemanfaatan ruang satuan satuan ruang strategis Pantai Selatan urusan kelautan dan perikanan (%)	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	
				Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (Dokumen)	1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	
			Terwujudnya Pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Bidang Perikanan Budidaya		Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi (%)	2.22.08 - P PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

				Laporan hasil pengembangan lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan)	2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman(Laporan)	2.22.08.5.06.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman	
		Terwujudnya Pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Bidang Perikanan Tangkap	Laporan hasil Pengembangan Budaya Bahari	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi (%)	2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		
					Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (Objek)	2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
					Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (Obyek)	2.22.08.5.06.0005 Pengembangan Budaya Bahari	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0002 -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0005 -Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)	3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02 -Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(Laporan)	3.25.01.2.02.0005 -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02.0007 -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	3.25.01.2.05 -Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		

				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.25.01.2.05.0003 -Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.25.01.2.05.0009 -Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 -Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 -Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25.01.2.09.0002 -Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	:3.25.01.2.09.0010- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	3.25.03-PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Jumlah Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Jumlah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	3.25.03.2.03 -Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Layanan)		
				Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	3.25.03.2.03.0001 -Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03.0002 -Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi perikanan budidaya (Ton)	3.25.04 -PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Jumlah pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 -Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 -Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Laporan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 -Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 -Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 -Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 -Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 -Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	25.05.2.01.0007 -Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun (Kg)	3.25.06 -PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala usaha dan resiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala usaha dan resiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 -Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Laporan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 -Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 -Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	25.06.2.03.0002 -Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel. 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.574.150.771,00		8.503.248.367,69		8.567.908.516,63		8.735.411.747,30		8.760.774.133,31	
1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
1.0.13- PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Outcome : Terwujudnya kawasan ruang strategis kabupaten Gunungkidul yang optimal di UPT TPI Arghamina	Persentase pemanfaatan ruang satuan ruang strategis pantai selatan urusan kelautan dan perikanan (%)				100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	
1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Output :Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (Dokumen)				1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	
1.03.13.5.02.0002- Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (Dokumen)	0	0	0	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	
2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
2.22.08 -PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAANYOGYAKA RTA URUSAN KEBUDAYAAN				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	

Outcome :Terwujudnya Pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Bidang Perikanan Budidaya	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi (%)		60	500.000.000	65	700.000.000	70	700.000.000	75	700.000.000	80	700.000.000	
2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				500.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Output :Laporan hasil pengembangan lumbung Mataraman	Jumlah laporan hasil pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan)		2	500.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	
2.22.08.5.06.0001 - Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah laporan hasil pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan)	-	-	500.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	
Outcome :Terwujudnya Pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Bidang Perikanan Tangkap	Persentase rata-rata penngkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi (%)		60	1.500.000.000	65	1.300.000.000	70	1.300.000.000	75	1.300.000.000	80	1.300.000.000	
2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				1.500.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Output :Laporan hasil Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (Obyek)		5	1.500.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	
2.22.08.5.06.0005 - Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (Obyek)	-	5	1.500.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	
3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.574.150.771,00		5.803.248.367,69		5.867.908.516,63		6.035.411.747,30		6.060.774.133,31	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.719.042.671,00		3.974.798.767,69		4.016.503.516,63		4.160.166.747,30		4.172.544.133,31	
Outcome :Meningkatnya tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	82,30	82,50		82,60		82,70		82,80		82,90		
3.25.01.2.01 -Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.879.800		47.233.000		48.833.000		51.386.100		52.886.000	

<i>Output : Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	6	5	1.500.000	5	1.878.000	5	2.078.000	5	2.278.100	5	2.478.000	
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	6	5	1.500.000	5	1.878.000	5	2.078.000	5	2.278.100	5	2.478.000	
<i>Output : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	2	3		3		3		3		3		
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	2	2		2		2		2		2		
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1	1		1		1		1		1		
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	17	17		17		17		17		17		
	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1	1		1		1		1		1		
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	3	3		3		3		3		4		
<i>Output :Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Perangkat Daerah</i>				42.379.800		45.355.000		46.755.000		49.108.000		50.408.000	
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	37.719.500	3	38.495.000	3	39.310.000	3	40.918.000	4	41.418.000	
3.25.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.065.000	1	1.550.000	1	1.815.000	1	2.015.000	1	2.215.000	

3.25.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	490.300	1	850.000	1	900.000	1	950.000	1	1.000.000	
3.25.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3	810.000	3	1.810.000	3	1.960.000	3	2.110.000	3	2.260.000	
3.25.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	360.000	2	700.000	2	770.000	2	915.000	2	1.015.000	
3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	17	17	1.935.000	17	1.950.000	17	2.000.000	17	2.200.000	17	2.500.000	
3.25.01.2.02 -Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.846.311.865		3.042.415.905,69		3.045.216.516,63		3.123.517.647,30		3.131.958.133,31	
Output :Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	546	546		546		546		546		546		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	13	13		13		13		13		13		
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	546	546	2.804.056.765,44	546	2.998.901.605,69	546	3.000.502.216,63	546	3.077.708.347,30	546	3.084.549.133,31	

3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.555.000	1	1.705.000	1	1.805.000	1	2.000.000	1	2.100.000	
3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	40.700.100	13	41.809.300	13	42.909.300	13	43.809.300	13	45.309.000	
3.25.01.2.05 -Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84.983.680		98.500.000		89.100.000		102.500.000		92.600.000	
Output: Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Paket)				1				1				
	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)		2		1		2		2		2		
	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian(Dokumen)	6	6		6		6		6		6		
3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut (Paket)	-	-	-	1	10.500.000	-	-	1	11.500.000	-	-	
3.25.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	69.233.680	6	71.500.000	6	72.100.000	6	73.500.000	6	74.600.000	
3.25.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	2	15.750.000	1	16.500.000	2	17.000.000	2	17.500.000	2	18.000.000	
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				122.968.100		132.800.000		147.050.000		162.563.000		151.650.000	
Output: Dokumen Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	17		17		17		17		17		
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)				247		248		247		247		

	<i>Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (Laporan)</i>	4	4		4		4		4		4		
	<i>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	12	12		12		12		12		12		
	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)</i>	12	12		12		12		12		12		
	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)</i>	14	13		12		13		12		13		
	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</i>	12	12		12		12		12		12		
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	3.482.000	12	3.750.000	12	3.750.000	12	4.000.000	12	4.500.000	
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	14	13	50.050.000	12	55.000.000	13	56.200.000	12	60.000.000	13	61.000.000	
3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	12	12	7.188.000	12	7.250.000	12	7.500.000	12	7.750.000	12	8.000.000	
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	4.989.100	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.163.000	12	5.500.000	
3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (Dokumen)	-	-	-	247	1.800.000	248	1.850.000	247	2.000.000	247	2.200.000	
3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	4	4	1.500.000	4	2.000.000	4	2.500.000	4	3.650.000	4	3.750.000	
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	17	55.759.000	17	58.000.000	17	70.150.000	17	80.000.000	17	66.700.000	
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.773.000		37.100.000		42.000.000		68.000.000		86.500.000	
Output :Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)				3		2		3		7		

	<i>Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)</i>		1		15		6		2		20		
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>				3		5		5		3		
3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1	10.773.000	15	14.100.000	6	15.000.000	2	15.100.000	20	19.500.000	
3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	3	12.000.000	5	14.000.000	5	37.600.000	3	50.000.000	
3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	3	11.000.000	2	13.000.000	3	15.300.000	7	17.000.000	
3.25.01.2.08 -Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				236.616.226		237.999.862		240.250.000		241.700.000		242.350.000	
Output :Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	300	300		300		300		300		300		
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)				4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	4	700.000	4	750.000	4	800.000	4	850.000	
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	300	300	235.416.226	300	236.099.862	300	238.200.000	300	239.500.000	300	240.000.000	
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.300.000	12	1.400.000	12	1.500.000	
3.25.01.2.09 -Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				373.510.000		378.750.000		404.054.000		410.500.000		414.600.000	

<i>Output: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)</i>	6	19		22		22		22		22		
	<i>Jumlah mebel yang dipelihara (unit)</i>				20		30		35		30		
	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)</i>	1	4		5		5		5		5		
	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (unit)</i>	716	626		626		626		626		626		
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)</i>	1	10		9		10		10		10		
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		716	626	237.355.000	626	238.500.000	626	239.500.000	626	241.000.000	626	242.000.000	
3.25.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	20	1.200.000	30	1.850.000	35	2.000.000	30	2.200.000	
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	19	5.850.000	22	5.850.000	22	6.000.000	22	6.300.000	22	6.500.000	
3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	4	37.440.000	5	40.000.000	5	62.204.000	5	65.500.000	5	67.000.000	
3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	10	92.865.000	9	93.200.000	10	94.500.000	10	95.700.000	10	96.900.000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				819.657.000		828.700.000		830.650.000		833.550.000		830.700.000	
Outcome :Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4058	4527		4753		4991		5241		5503		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota				211.196.000		215.200.000		216.150.000		217.200.000		218.700.000	

<i>Output :Jumlah pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota</i>	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orag)	20	360	-	170	-	220	-	270	-	320	-	
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	20	360	211.196.000	170	215.200.000	220	216.150.000	270	217.200.000	320	218.700.000	
<i>3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>				608.461.000		613.500.000		614.500.000		616.350.000		612.000.000	
<i>Output: Jumlah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	<i>Jumlah SOP pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)</i>				1		1		1		1		
	<i>Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)</i>	15	15		15		15		15		15		
3.25.03.2.03.0001 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	-	-	-	1	4.250.000	1	4.450.000	1	4.750.000	-	-	
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	15	15	608.461.000	15	609.250.000	15	610.050.000	15	611.600.000	15	612.000.000	
3.25.04 -PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				631.467.600		592.739.600		599.005.000		611.505.000		618.370.000	
Outcome :Meningkatnya prosuksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	11.680,24	11.899,34		12.021,33		12.138,61		12.258,18		12.389,46		
<i>3.25.04.2.02- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>				92.704.700		93.300.000		94.450.000		95.255.000		96.250.000	
<i>Output:Jumlah pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</i>	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok))	10	15	-	60	-	63	-	70	-	70	-	
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10	15	92.704.700	60	93.300.000	63	94.450.000	70	95.255.000	70	96.250.000	

3.25.04.2.04 -Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				538.762.900		499.439.600		504.555.000		516.250.000		522.120.000	
Output :Laporan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		3	3		3		3		3		3		
3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	6	6	33.000.000	6	35.356.600	6	37.000.000	6	45.000.000	6	47.000.000	
Output: Laporan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota													
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	7	4	149.554.900	20	105.200.000	26	107.300.000	24	109.100.000	22	111.220.000	
Output : Laporan penyediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 9satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota(Unit)												
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	16	16	356.208.000	16	358.883.000	16	360.255.000	16	362.150.000	16	363.900.000	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				32.839.500		34.800.000		36.750.000		38.350.000		40.560.000	
OutcomeMeningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	45	54	-	68	-	77	-	91	-	100	-	
3.25.05.2.01 -Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota				32.839.500		34.800.000		36.750.000		38.350.000		40.560.000	

<i>Output :Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota</i>			10		15	-	20	-	25	-	30	-	
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	-	10	32.839.500	15	34.800.000	20	36.750.000	25	38.350.000	30	40.560.000	
3.25.06 -PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				371.144.000		372.210.000	9,7	385.000.000		391.840.000		398.600.000	
Outcome:Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun (Kg)	9,30	9,50		9,60		9,70		9,80		9,90		
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				23.660.000		24.810.000		32.100.000		35.450.000		38.600.000	
<i>Output: Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	12	14	-	15	-	16	-	17	-	18	-	
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko(Unit Usaha)	12	14	23.660.000	15	24.810.000	16	32.100.000	17	35.450.000	18	38.600.000	
3.25.06.2.03 -Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				347.484.000		347.400.000		352.900.000		356.390.000		360.000.000	

<i>Output :Laporan peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Ton)</i>	311,52	500		500		500		500		500		
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	311,52	500	239.824.000	500	240.400.000	500	243.400.000	500	246.240.000	500	249.000.000	
<i>Output : Laporan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)</i>		20		20		20		20		20		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	-	20	107.660.000	20	107.000.000	20	109.500.000	20	110.150.000	20	111.000.000	

Sedangkan Sub Kegiatan Prioritas untuk mendukung program Prioritas Pembangunan tersaji dalam tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Terwujudnya kawasan ruang strategis kabupaten Gunungkidul yang optimal di UPT TPI Arghamina	Kegiatan : 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sub Kegiatan :1.03.13.5.02.0002 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	
2	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Bidang Perikanan Budidaya	Kegiatan : 2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub Kegiatan : 2.22.08.5.06.0001 - Pengembangan Lumbung Mataraman	
		Terwujudnya Pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Bidang Perikanan Tangkap	Kegiatan : 2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 2.22.08.5.06.0005 - Pengembangan Budaya Bahari	
3	3.25.01 -PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		
			Kegiatan :3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.01.0001 -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.01.0002 -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Sub Kegiatan: 3.25.01.2.01.0003 -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Sub Kegiatan: 3.25.01.2.01.0004 -Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0005 -Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan :3.25.01.2.02 -Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.02.0001 -Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.02.0005 -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.02.0007 -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Kegiatan : 3.25.01.2.05 -Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.05.0003 -Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.05.0009 -Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Kegiatan :3.25.01.2.06 -Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.06.0001 -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.06.0002 -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.06.0003 -Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

			Sub Kegiatan :3.25.01.2.06.0005 -Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.06.0006 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
			Kegiatan :3.25.01.2.07 -Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 -Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan :3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan :3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.09.0005 -Pemeliharaan Mebel	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.09.0006 -Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan: 3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan :3.25.01.2.09.0010- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4	3.25.03 -PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap		
			Kegiatan :3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :3.25.03.2.02.0001 -Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Kegiatan :3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Sub kegiatan :3.25.03.2.03.0001 -Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Sub Kegiatan :'3.25.03.2.03.0002 -Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
5	3.25.04 - 'PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		
			Kegiatan :3.25.04.2.02 -Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Sub Kegiatan :3.25.04.2.02.0004 -Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	

			Kegiatan :3.25.04.2.04 -Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Sub Kegiatan :3.25.04.2.04.0002 -Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :3.25.04.2.04.0009 - 'Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :3.25.04.2.04.0004 -Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		
			Kegiatan :3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :3.25.05.2.01.0007 -Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
7	3.25.06 -PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		
			Kegiatan :3.25.06.2.02 -Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Sub Kegiatan :3.25.06.2.02.0002 -Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	
			Kegiatan :3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan :3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :3.25.06.2.03.0002 -Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) dirumuskan berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029, dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang dikembangkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai rumusan visi dan misi kedua, yaitu: *“Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif”*. Secara eksplisit memberikan kesempatan yang cukup luas bagi pengembangan potensi bidang kelautan dan perikanan untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis bidang kelautan dan perikanan dalam rangka menggerakkan, mengelola potensi kelautan dan perikanan.

Indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 seperti tertera pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Produksi Perikanan	Rupiah	401.283.752.468	404.135.066.032	407.002.185.408	409.885.551.585	412.785.625.861	415.702.890.836	Akumulasi nilai produksi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan
2	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan	Rupiah	46.260.082	47.491.086	48.733.640	49.988.322	51.255.737	52.536.524	Jumlah pendapatan masyarakat perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKK OUTCOME								
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah produksi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya ikan dalam kurun waktu 1 tahun
									Jumlah produksi tangkap laut dan perairan darat + pembudidaya ikan dalam 1 tahun

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan pembangunan sesuai masa periode Bupati terpilih. Dokumen renstra digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Sub sektor kelautan dan perikanan merupakan bagian dari sektor pertanian dalam arti luas. Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul juga ditentukan oleh dukungan dari sektor-sektor terkait, *stakeholder* dan masyarakat. Sinergitas antara semua pihak mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

KEPALA,



M. JOHAN WIJAYANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan							
1	Nilai Produksi Perikanan	Rp	Mengukur nilai produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	{(Total Produksi perikanan Tangkap (Kg) X Rerata Harga Komoditas Perikanan Tangkap(Rp/Kg))} + {(Total Produksi Perikanan Budidaya (Kg) X Rerata Harga Komoditas Perikanan Budidaya (Rp/Kg))} + {(Total Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Kg) x Rerata Harga Komoditas Pengolahan Hasil Perikanan (Rp/Kg))}	Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan	Rp	Mengukur pendapatan perkapita masyarakat perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolah hasil perikanan	{(Nilai Produksi PerikananTangkap-Biaya Operasional) / Jumlah Nelayan } + {(Nilai Produksi Perikanan Budidaya-Biaya Operasional) / Jumlah Pembudidaya Ikan} + { (Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan-Biaya Operasional) / Jumlah Pengolah Hasil Perikanan}	Menunjukan ukuran pendapatan rata-rata yang dihasilkan dari kegiatan perikanan, baik itu dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan hasil perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
INDIKATOR KINERJA KUNCI							
AA	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya)	%	Mengukur total produksi perikanan kabupaten	(Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan Budidaya) Kabupaten dibagi Target produksi perikanan (tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan) x 100%	Menunjukkan hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan budidaya ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						
Terwujudnya kawasan ruang strategis kabupaten Gunungkidul yang optimal di UPT TPI Arghamina	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)	Mengukur pemanfaatan kawasan ruang satuan strategis pantai selatan untuk urusan kelautan dan perikanan	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan, yang dinyatakan dalam persen	Persentase meningkatnya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis pantai selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Bidang Perikanan Budidaya	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi (%)	Persentase peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	jumlah pelaku usaha perikanan yang meningkat kapasitasnya/ total pelaku usaha yang difasilitasi x 100%	Persentase meningkatnya kapasitas pelaku usaha pembudidaya ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Bidang Perikanan Tangkap	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi (%)	Persentase peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	jumlah pelaku usaha perikanan yang meningkat kapasitasnya/ total pelaku usaha yang difasilitasi x 100%	Persentase meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Mengukur produksi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan dalam kurun waktu 1 tahun	Jumlah produksi tangkap laut + jumlah produksi perairan darat dalam 1 tahun	Semakin tinggi produksi perikanan tangkap mencerminkan peningkatan sumber daya perikanan baik di laut maupun perairan darat	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan

3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Mengukur produksi perikanan yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan dalam kurun waktu 1 tahun	Jumlah produksi perikanan yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan dalam kurun waktu 1 tahun	Semakin tinggi produksi perikanan budidaya, mencerminkan meningkatnya total produksi ikan hasil budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	Mengukur wilayah Pokmaswas yang mendapat pembinaan	Jumlah Wilayah Pokmaswas yang mendapat pembinaan dibagi jumlah Pokmaswas x 100 %	Semakin tinggi prosentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menunjukan adanya upaya untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun (Kg)	Mengukur Konsumsi ikan perkapita masyarakat dalam satu tahun	((Konsumsi Ikan per Kapita di Rumah Tangga (setara utuh segar) x Penimbang Individu)) dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	Menunjukkan ukuran jumlah ikan yang dikonsumsi oleh satu orang dalam satu tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan